



LEMHANNAS RI

NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

Edisi VI 20 Januari 2010

Laut Sebagai Ruang Hidup dan Ruang Juang Bangsa Indonesia untuk Kejayaan Nusantara



Selamat Natal & Tahun Baru 2010

Senin, 14 Desember 2009, Gubernur Lemhannas RI Prof DR. Muladi, SH. bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Nusantara di Lemhannas RI dengan tema "Laut Sebagai Ruang Hidup dan Ruang Juang Bangsa Indonesia Untuk

Kejayaan Nusantara". Melalui Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara ditetapkan bahwa 13 Desember adalah Hari Nasional walaupun bukan merupakan hari libur.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Hari Nusantara perlu kita peringati melalui suatu Upacara Bendera, di semua instansi baik pusat maupun daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa kita adalah bangsa bahari dan merupakan Negara Kepulauan. Pengakuan sebagai Negara Kepulauan bukan sesuatu yang mudah tapi buah dari perjuangan yang panjang. Sejarah telah mencatat pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia saat itu dibawah kepemimpinan Presiden RI Soekarno dengan gagah berani menyatakan kepada dunia Internasional tentang kedaulatan Republik Indonesia yang mencakup wilayah laut teritorial (pedalaman) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah daratan.

Lebih jauh dikatakan, jika saja tidak ada "Deklarasi Djoeanda", yang diumumkan pada tanggal 13 Desember 1957 tersebut, maka wilayah laut Indonesia hanya disekitar pulau-pulau, sejauh tiga mil dari pantai. Artinya, diantara pulau-pulau Indonesia terdapat laut Internasional, siapa saja boleh masuk. Pulau-pulau kita saling terpisah, padahal laut adalah jalan kita. Kondisi seperti ini akan membahayakan kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Deklarasi Djoeanda telah menggemparkan masyarakat Internasional sehingga deklarasi tersebut tidak langsung diterima oleh dunia, diantara Negara yang menentangnya adalah Amerika Serikat dan Australia yang merupakan Negara daratan. Namun, melalui perjuangan yang gigih dengan diplomasi yang panjang dan alot, akhirnya konsepsi Negara Nusantara tersebut diterima dan



Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. sedang membacakan teks Pancasila dalam Upacara Hari Nusantara, pada tanggal 14 Desember 2009 di lapangan Tengah Lemhannas RI

ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, *United Nation Convention on Law of The Sea (UNCLOS)1982*.

Dengan diterimanya prinsip-prinsip wilayah laut Negara Kepulauan (Nusantara) tersebut, maka wilayah laut Indonesia bertambah luas, dengan demikian hasil kekayaannya pun bertambah, tetapi yang lebih penting lagi, wilayah Indonesia menjadi bulat dan utuh tidak terpisah-pisah. Melalui tema ini kita memaknai bahwa laut Nusantara dapat dijadikan sebagai pilar utama ekonomi bangsa. Oleh karenanya di akhir sambutan Menteri mengajak segenap Bangsa Indonesia untuk menatap kedepan, dimana terdapat peluang bagi kita dalam mewujudkan suatu cita-cita besar, sebagai suatu Negara, yang kuat, bermartabat, maju dan mandiri di bidang kelautan.

DAFTAR ISI

1. Laut Sebagai Ruang Hidup dan Ruang Juang Bangsa Indonesia Untuk Kejayaan Nusantara	1
2. Pembekalan Presiden RI Kepada Alumni PPSA XVI dan PPRA XLIII Lemhannas RI TA. 2009.....	2
3. Kunjungan Mr. Quentin Davies, <i>Minister for Defence Equipment and support</i>	4
4. Musyawarah Nasional ke-2 Ikatan Alumni Lemhannas RI	5
5. Jam Pimpinan Gubernur Lemhannas RI.....	6
6. Peringatan Hari Ibu ke-81	8
7. Dewan Pengarah Lemhannas RI	9
8. Penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIII Lembaga Ketahanan Nasional RI.....	10
9. Koordinasi Penyusunan LAKIP Tahun 2009.....	11
10. SERTIJAB.....	12



Para Pejabat Tinggi Lemhannas mengikuti Upacara Hari Nusantara

PEMBEKALAN PRESIDEN RI KEPADA ALUMNI PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGGKATAN (PPSA) XVI DAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER (PPRA) XLIII LEMHANNAS RI TA. 2009



Presiden RI DR. Susilo Bambang Yudhoyono memberi pembekalan kepada alumni PPSA XVI dan peserta PPRA XLIII Lemhannas RI di Istana Negara pada tanggal 7 Desember 2009

Presiden RI DR. Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutannya pada saat pembekalan Alumni PPSA XVI dan Peserta PPRA XLIII Lemhannas RI Tahun 2009 Tanggal 7 Desember 2009 di Istana Negara.

Dalam sambutannya DR. Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Lemhannas RI telah berhasil menyelenggarakan 2 pendidikan yaitu Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVI selama lima setengah bulan dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIII selama sembilan setengah bulan, dan masing-masing telah melaksanakan seminar sebagai puncak kegiatan pendidikan. Untuk PPSA XVI melaksanakan Seminar dengan Judul "Membangun Indeks Pencegahan dan Penindakan Korupsi Indonesia Guna Mewujudkan *Good Governance* dalam rangka Pembangunan Nasional". Dan PPRA XLIII dengan Judul "Penguatan Kebijakan Energi guna Mendukung Perekonomian Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional"

Untuk itu Presiden RI menyampaikan penghargaan dan Terimakasih kepada Gubernur Lemhannas RI beserta

jajarannya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan ucapan selamat kepada seluruh peserta PPSA XVI dan PPRA XLIII TA. 2009 yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan.

Presiden RI DR. Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa terkait dengan masalah korupsi telah dilaksanakan pemberantasan korupsi namun belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena belum terwujudnya sistem penegakan hukum yang mantap oleh aparat yang terkait. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh Negara dengan melalui berbagai cara, metoda, pengawasan dan kebijakan tetapi hal tersebut belum dianggap cukup untuk membawa Indonesia menjadi Negara yang bersih dari Korupsi. Oleh karena itu adanya partisipasi aktif semua pihak secara individu maupun keterwakilan secara langsung maupun tidak langsung melalui institusi intermediasi yang memiliki legitimasi merupakan kunci dari *Good Governance*. Untuk itu perlu adanya pelaku kekuatan hukum yang independen serta Kepolisian yang bebas dari kepentingan politik dan KKN.

Hal penting lain yang merupakan perhatian dunia untuk menjaga kelangsungan hidup adalah pengelolaan energi. Sumberdayaenergimerupakan salahsatu faktor yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan nasional. Keterbatasan sumber daya energi saat ini maupun di masa yang akan datang akan menjadi kendala yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi dimana kebutuhan masyarakat luas akan energi dapat terpenuhi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip ketersediaan, keterjangkauan dan *akseptabilitas* (mutu dan harga). Untuk itu upaya menciptakan ketahanan energi membutuhkan dukungan berkembangnya energi alternatif, membudayanya konservasi energi, dan keterjaminan akses atau kesesuaian antara persebaran sumber-sumber energi dan konsumen serta pertumbuhan kemampuan nasional dalam penyediaan energi untuk menjamin terciptanya ketahanan energi nasional dalam rangka Ketahanan Nasional. Disamping itu ancaman terbesar dalam me-



Penyerahan Buku Naskah hasil Seminar PPRA XLII yang bertema "Penguatan Kebijakan Energi guna Mendukung Perekonomian Nasional Dalam rangka Ketahanan Nasional" oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. kepada Presiden RI DR. Susilo Bambang Yudhoyono

wujudkan ketahanan energi adalah harga energi berbasis migas yang cenderung tidak stabil dan terus meningkat sehingga diperlukan subsidi dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan *akseptabilitas* mutu dan harga energi berbasis migas bagi konsumen. Pada akhir sambutannya Presiden RI DR. Susilo Bambang Yudhoyono menyampaik-

kanbahwasebagai pimpintingkat nasional saudara-saudara dituntut untuk ikut aktif dalam mengatasi permasalahan pemberantasan korupsi dan dapat mengatasi krisis energi dan berharap bahwa pengetahuan serta wawasan yang didapatkan selama pendidikan dapat diterapkan dalam melaksanakan tugas di bidang masing-masing. Pada kesempatan tersebut Presiden RI minta agar Lemhannas RI pada tahun 2010 dapat menyelenggarakan seminar tentang Kondisi Ekonomi Indonesia Pasca Krisis Ekonomi Global.



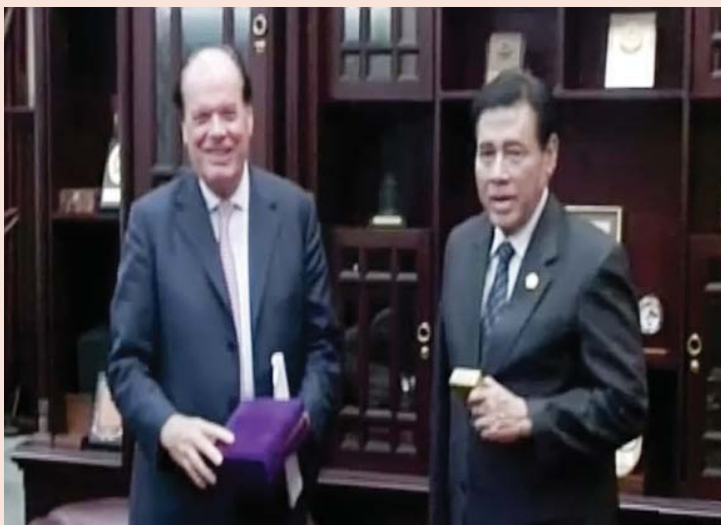
Suasana saat mendengarkan pembekalan oleh Presiden RI di Istana Negara pada tanggal 7 Desember 2009

Kunjungan Mr. Quentin Davies, Minister for Defence Equipment and Support

Tanggal 3 Desember 2009, Mr. Quentin Davies, *Minister for Defence Equipment and Support* beserta 4 (empat) orang anggota dari *Defence Equipment and Support*, melaksanakan kunjungan kehormatan ke Lemhannas RI. Pada *courtesy call* tersebut Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi SH. di dampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI. DR. Rio Mendung Thalieb, Sekretaris Dewan Pengarah Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang dan Tenaga Ahli Pengajar bidang Hubungan Internasional Marsda TNI Surya Dharma, S.IP, Kepala Biro Kerma Brigjen TNI



Gubernur Lemhannas RI sedang berbicara dengan rombongan *Minister for Defence Equipment and Support* yang dipimpin oleh Mr. Quentin Davies, di dampingi Wakil Gubernur dan Sekretaris Dewan Pengarah Lemhannas RI di Ruang Kerja Gubernur



Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH setelah menyerahkan *plaquet* kepada Mr. Quentin, *Minister for Defence Equipment and Support* di Ruang Kerja Gubernur Pada tanggal 3 Desember 2009

Puspo Djoko Purwanto, S.IP dan Kepala Biro Humas Brigjen TNI Kusworo.

Pada kesempatan tersebut pimpinan rombongan menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya ke Lemhannas RI, kemudian acara dilanjutkan ceramah yang diikuti oleh seluruh peserta PPRA XLIII tahun 2009, acara ceramah dipimpin oleh Marsda TNI Surya Dharma, S.IP, bertempat di Gedung Panca Gatra Lt. III Barat dengan topik *Defence Acquisition Reform* dan dilanjutkan dengan tanya jawab, acara diakhiri dengan tukar-menukar cenderamata, dan selanjutnya rombongan meninggalkan Lemhannas RI pukul 13.45 WIB.

MUSYAWARAH NASIONAL KE-2 IKATAN ALUMNI LEMHANNAS RI

Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) adalah Organisasi yang bersifat kekeluargaan dan merupakan bagian dari Lemhannas RI, berstatus non struktural dan independen, dimana Gubernur Lemhannas RI dalam kepengurusan IKAL adalah sebagai pembina.

IKAL dalam pengabdian dan program kerjanya senantiasa berkontribusi positif dalam upaya ikut serta meningkatkan kualitas, citra dan reputasi almamaternya yaitu Lemhannas RI. Terlebih dewasa ini keberadaan IKAL semakin berkembang karena mulai tahun 2009 dan seterusnya Lemhannas RI membuka kesempatan peserta program pendidikan dari beberapa negara sahabat.

Munas ke-2 IKAL yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2009, dengan tema "Membangun Kembali Karakter Bangsa" merupakan wahana untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Program Kerja IKAL tahun 2005-2009, menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAL, dan dilanjutkan penyusunan Program Kerja IKAL tahun 2010 - 2014 serta memilih ketua umum IKAL beserta susunan pengurus IKAL yang baru. Selain acara di atas, kesempatan tersebut digunakan para alumni untuk lebih mempererat tali silaturahmi.

Munas juga mencermati kondisi saat ini dengan melemahnya pemahaman wawasan kebangsaan, terkikisnya jiwa persatuan dan kesatuan bangsa tentunya akan berpengaruh dalam mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme, sehingga akan mengalami kesulitan yang sangat *krusial* dalam menggugah kembali semangat dan tekad bangsa ini untuk mau bekerja keras dan membangun negara yang kita cintai.

Sesuai tema Munas ke-2 IKAL sudah saatnya untuk menyusun kebijakan strategis dalam rangka memperkuat kembali jalinan kebersamaan, *kohesitas* dan *soliditas* persatuan dan kesatuan nasional, diatas semboyan Bhinneka Tunggal Ika,



Suasana dalam Musyawarah Nasional ke-2 IKAL yang dihadiri oleh Pejabat Teras Lemhannas RI, Pejabat Struktural IKAL dan Peserta Munas ke-2 IKAL lainnya saat mendengarkan sambutan dari Ketua Umum IKAL



Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. didampingi oleh ketua umum IKAL Jenderal (Purn) Agum Gumelar melakukan pemukulan Gong sebagai tanda dibukanya Musyawarah Nasional ke-2 IKAL di Gedung Tri Gatra Lt. III Barat Lemhannas RI

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kembangkan terus sikap dan budaya berfikir serta bertindak secara positif dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta senantiasa berfikir *visioner*, menjangkau kemas depan yang lebih baik, berorientasi pada misi yang bernilai *universal*, untuk menghadapi tantangan kebebasan, kemandirian dan hak asasi manusia demi kepentingan keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menuju kemandirian dan kesetaraan dengan bangsa bangsa maju lainnya.

Keberadaan IKAL dengan Lemhannas RI tidak dapat dipisahkan dan saling memberikan masukan, sehingga dalam program kerjanya pun saling terkait satu sama lainnya. Sesuai tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya organisasi IKAL yang semakin solid dan bermakna serta bermanfaat, bukan hanya untuk anggotanya saja, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pemilihan Ketua, terpilih kembali Jenderal (Purn) Agum Gumelar sebagai Ketua Umum IKAL Pusat Periode 2010-2014. Dalam hal tersebut Gubernur Lemhannas RI selaku Pembina sempat mengingatkan bahwa terpilihnya kepengurusan yang baru periode tahun 2010-2014, perlu disadari bahwa jabatan sebagai ketua umum IKAL adalah pekerja sosial yang dilandasi kejujuran dan pengorbanan baik waktu maupun materi. Sejauh ini IKAL telah dapat menunjukkan kerjasama dan pengabdian yang positif baik dibidang kekeluargaan, pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, dengan harapan hal-hal yang sudah berjalan baik minimal dapat dipertahankan dan maksimal dapat ditingkatkan oleh kepengurusan baru.

Jam Pimpinan Gubernur Lemhannas RI

Senin 28 Desember 2009 Lemhannas RI melaksanakan Jam Pimpinan sebagai sarana komunikasi dua arah antar pimpinan dengan segenap anggota Lemhannas RI. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Utama, para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, dan seluruh personel PNS, TNI, dan Polri Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, S.H. dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemu-

an di akhir tahun 2009 ini, hendaknya menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja masing-masing guna memperbaiki berbagai kekurangan dalam rangka memasuki Tahun Anggaran 2010. Atas nama Lemhannas RI dan pribadi, Gubernur Lemhannas RI mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah 1 Muharam 1431 H bagi warga muslim, Selamat Natal bagi warga Nasrani, dan Selamat Tahun Baru 2010 bagi seluruh warga. Semoga kita semua menjadi lebih baik lagi di tahun 2010 yang akan

datang.

Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa dalam rangka menjadikan Lemhannas RI, sebagai *Center of Excellence*, maka secara berkesinambungan Lemhannas RI terus melaksanakan revitalisasi dengan menyiapkan dan mengembangkan berbagai program ICT, yaitu: *E-Office*, *E-Evaluation*, *E-Procurement*, *E-Library*, *E-Learning*, *E-Board*, dan *E-Video Conference*.

Hasil pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga, baik di bidang



Suasana Jam Pimpinan saat Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi SH. memberikan arahan kepada seluruh Pejabat dan Staf Lemhannas RI di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI pada tanggal 28 Desember 2009



Salah satu staf Lemhannas RI bertanya pada sesi tanya-jawab setelah selesainya arahan dari Gubernur Lemhannas RI

Pendidikan, Pengkajian Strategis dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, maupun Kesettamaan. Model ICT ini pada tahun 2010 akan terus ditingkatkan.

Dalam rangka mendukung kegiatan Pengkajian Strategik yang berkaitan dengan Ketahanan Nasional, Lemhannas RI telah bekerjasama dengan 14 Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia dan beberapa Lembaga Kajian lainnya, seperti: CSIS, Habibi Center dan LIPI, yang sekarang sedang dilaksanakan peningkatan implementasi dan perluasan kerjasamanya. Dalam rangka pengembangan laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, Lemhannas RI telah bekerjasama dengan 33 Pemda Provinsi seluruh Indonesia, dan bekerjasama pula dengan beberapa Lembaga Luar Negeri, seperti: Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), *Australia Defence College (ADC)*, dan *Frederik Ebert Stif Tung (FES Jerman)*. Lemhannas RI juga telah berhasil melaksanakan Forum Konsolidasi

(Forkon) Pimpinan Pemda dan anggota DPRD seluruh Indonesia dalam rangka menyiapkan dan memantapkan para pimpinan tingkat daerah agar memiliki keunggulan kompetitif dan kemampuan strategis dalam mengantisipasi dan mengatasi krisis dalam negeri maupun di daerah, guna mendukung Pembangunan Nasional. Karenanya Forkon tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2010 yang akan datang dengan mengikut-

sertakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD).

Selanjutnya Gubernur Lemhannas RI mengharapkan kepada segenap personel Lemhannas RI, untuk dapat memberikan informasi dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada peserta Program Pendidikan, terutama kepada peserta dari Negara-negara sahabat dengan tetap menjaga citra bangsa Indonesia, dan Lemhannas RI.

Pada akhir sambutan, Gubernur menyampaikan berbagai keberhasilan telah dicapai hingga saat ini yang merupakan sinergi dan kerja keras seluruh anggota Lemhannas RI, Selanjutnya Gubernur mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada segenap warga Lemhannas RI, serta mengajak segenap warga Lemhannas RI untuk meningkatkan kinerja masing-masing dengan dilandasi disiplin tinggi, dan semangat rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai acara tambahan, ditampilkan orasi apresiasi batik Indonesia dan peragaan busana batik oleh 10 anggota Lemhannas RI



Peragaan Busana Batik yang di peragakan oleh beberapa Staf Lemhannas RI

Peringatan Hari Ibu Ke-81



Pembacaan Amanat pada Upacara Hari Ibu ke-81 oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI pada tanggal 22 Desember 2009

Tanggal 22 Desember 2009, Lemhannas RI melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ibu di dalam Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Dalam sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibacakan oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH. disampaikan bahwa Peringatan Hari Ibu merupakan salah satu upaya untuk mengenang peristiwa tersebut sebagai sejarah perjuangan perempuan Indonesia untuk turut serta bahu membahu dengan kaum laki-laki mempertahankan kehormatan Bangsa dan Negara. Para perempuan juga telah berpartisipasi di dalam melaksanakan kongres perempuan Indonesia I pada tanggal 22 desember 1928 di Jogjakarta, kemudian mereka ikut berjuang mencapai Indonesia merdeka dan mempertahankannya, serta mengisi kemerdekaan ini melalui peran serta dalam pembangunan nasional. Sehingga terlihat jelas, bahwa kaum perempuan bukan hanya pelengkap dalam memperjuangkan negeri ini, tetapi perempuan juga menjadi bagian utama bersama kaum laki-laki, di dalam memajukan kehidupan bangsa di negeri ini dan turut berkiprah di berbagai bidang kehidupan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, LSM dan Swasta guna memberdayakan kaum perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender, dan terlihat kemajuan tersebut di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hukum dan pengambilan keputusan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa ini masih terdapat 4 (empat) bentuk proses diskriminasi terhadap perempuan yaitu; (1) Masih adanya penolakan terhadap peran perempuan di ruang publik; (2) Rendahnya anggaran untuk menghapuskan diskriminasi dan kesenjangan gender; (3) Masih rendahnya perhatian untuk memenuhi hak kesehatan reproduksi dan perlindungan kerja; (4) Maraknya peraturan daerah yang diskriminatif terhadap kaum perempuan yang membatasi kiprah mereka. Namun demikian disadari bahwa implementasi strategi pengarusutamaan gender masih mengalami banyak tantangan dilapangan, karena rendahnya

pemahaman sampai dengan kurangnya komitmen pengambil keputusan dan elit politik sehingga masih terjadi kesenjangan dalam peran dan kedudukan di berbagai bidang pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Tema peringatan Hari Ibu ke-81 tahun 2009 adalah **"Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki dalam Pembangunan Nasional"**. Berkaitan dengan itu strategi pengarusutamaan gender perlu diintegrasikan di sektor pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah dan atas, serta disemua tingkatan pendidikan sebelum tahun 2015. Dibidang kesehatan fokus utamanya adalah untuk melindungi kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak reproduksi perempuan, dan anak perempuan, serta menurunkan angka kematian ibu. Selain itu mengintegrasikan gender kedalam infrastruktur untuk mengurangi beban perempuan dan anak perempuan.

Selanjutnya perspektif gender juga perlu diintegrasikan didalam pemenuhan hak perempuan terhadap kepemilikan atas tanah dan properti lainnya; menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk didalam situasi konflik serta meningkatkan partisipasi perempuan di ruang publik di tiap tingkatan. Untuk mengatasi permasalahan diatas, perlu dukungan semua pihak. Untuk itu melalui semangat Hari Ibu kali ini Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ingin mengajak semuanya untuk merapatkan barisan dan menyatukan tekad serta semangat guna menghapuskan segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan bersama dengan kaum laki-laki dalam seluruh elemen masyarakat lainnya. Tanpa adanya kerjasama dan komitmen yang kuat tidak mungkin dapat diwujudkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai salah satu upaya untuk menciptakan Indonesia yang demokratis, adil dan damai.



Ketua dan para pengurus Ibu Dharma Wanita Lemhannas RI mengikuti Upacara Peringatan Hari Ibu ke-81 tanggal 22 Desember 2009 di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI

KEGIATAN INTELLECTUAL EXERCISE DEWAN PENGARAH LEMHANNAS RI



Suasana acara Intellectual Exercise Dewan Pengarah Lemhannas RI yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH.

Dewan Pengarah Lemhannas RI mengadakan kegiatan rutin *Intellectual Exercise* bulan Januari pada tanggal 11 Januari 2010 pukul 09.00 sampai dengan selesai di Gedung Asta gatra Lantai III Barat. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengarah setiap satu bulan sekali tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, SH yang dihadiri oleh para anggota Dewan Pengarah, Tenaga Profesional, Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Ahli Pengkajian Lemhannas RI serta para pejabat Eselon I Lemhannas RI.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan *current issues* yang terjadi pada kalender akhir tahun 2009 di kawasan Indonesia Timur tentang adanya penembakan misterius secara sporadik dan berkelanjutan di daerah pertambangan PT. Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika, Papua. Kemudian awal tahun 2010 di Timika, Kabupaten Mimika Papua terjadi perang antar suku dengan korban 2 orang tewas dan puluhan luka berat dan ringan. Di sisi lain demokratisasi yang sedang berkembang dengan baik di Indonesia masih diwarnai dan dinodai dengan dinamika antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada kesempatan kegiatan tersebut dipaparkan 3 (tiga) topik dan pemaparnya masing-masing sebagai berikut:

1. **"Permasalahan dan Solusi Kewaspadaan Nasional Khusus-nya Gerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka Dalam Semester I Tahun 2010 Kabinet Indonesia Bersatu ke-II"** oleh Dr. Kausar A.S, M.Si.
2. **"Permasalahan dan Solusi Demokratisasi Indonesia Khususnya Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif Tingkat Pusat dan Daerah Pada Tahun 2010"**, oleh Drs. H. Edijan Tandjung, M.Si.
3. **"Permasalahan dan Solusi Politik Nasional Khususnya Pilkada Propinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2010"**, oleh Syafran, SH, M. Hum.

PENUTUPAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGARAN XLIII LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIII yang berlangsung selama sembilan setengah bulan dapat berjalan lancar sesuai kurikulum yang telah ditetapkan, dan pada hari Rabu, 10 Desember 2009 ditutup melalui Upacara Penutupan Pendidikan oleh Gubernur Lemhannas RI di Gedung Dwi Warna Purwa.

PPRA XLIII tahun 2009 mengangkat tema "Pembangunan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional", bertujuan mengajak peserta didik lebih memahami dan menghayati pentingnya pembangunan ekonomi nasional dalam rangka Ketahanan Nasional. Tema tersebut juga dijabarkan dalam berbagai materi perkuliahan dan diskusi selama proses belajar mengajar berlangsung sesuai kondisi lingkungan strategis global, regional dan nasional yang berdampak langsung terhadap perkembangan perekonomian nasional. Patut berbangga dan berbesar hati, ditengah badai krisis finansial global, perekonomian Indonesia masih tumbuh positif dibandingkan negara-negara lain di dunia selain China dan India dalam kelompok G 20, yang juga ditengah badai krisis finansial global masih tumbuh positif.

Gubernur Lemhannas RI menyatakan bahwa prinsip perubahan kurikulum yang telah dilaksanakan meliputi prinsip efisiensi dan efektifitas dengan mengembangkan pembelajaran jarak jauh (*Long Distance Education*) selama tahap *off campus*, prinsip keseimbangan antara *inward-outward looking*, prinsip *quality assurance* yang berupaya mensejajarkan Lemhannas RI dengan lembaga sejenis di luar negeri, prinsip adaptasi teknologi dengan memanfaatkan teknologi telematika (telekomunikasi, multimedia dan komunikasi), prinsip *continuing education* yang memungkinkan para alumnus PPRA dapat meneruskan studi pasca sarjana di bidang studi strategis. Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip menjunjung tinggi kebenaran dengan menegakkan *intellectual integrity*, *academic freedom* and *academic culture* dalam mengikuti pendidikan di Lemhannas RI.

Perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional yang semakin dinamis dan cenderung *asymetric*,



Peserta PPRA XLIII Lemhannas RI yang mendapat Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha : DR. IR. Roy Alexander Sparringa, M.App, Sc, Drs. Wahyu Indra Pramugari, SH. MH., Drs. Arief Dharmawan, SH. MH. MM. dan yang mendapat Penghargaan Predikat Andalan : Kolonel Marinir Achmad Faridz Washington, DR. Pariatmono, M.Sc. dan Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE, M.Si pada tanggal 10 Desember 2009 di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

dengan berbagai dampak bawaannya, adalah fenomena yang harus disikapi dengan tepat, cerdas dan bijak oleh setiap warga negara dan pimpinan guna menjamin kelangsungan kehidupan dengan perspektif kepentingan nasional.

Fenomena *asymetric threat*, *asymetric war* yang semakin mengemuka saat ini memunculkan kendala dan tantangan yang tidak ringan, selain berbagai peluang bawaannya dalam dimensi internal maupun eksternal, berpotensi memberi *opportunity* atau kesempatan selain ancaman terhadap kelangsungan kehidupan termasuk perekonomian nasional. Seperti halnya saat ini kompleksitas permasalahan nasional yang terus menyelimuti bangsa dan negara diharapkan dapat dipecahkan dengan cara-cara yang lebih elegan dan bermartabat, tanpa melalui konflik-konflik yang melelahkan antar sesama komponen bangsa maupun pemimpin nasional yang membawa dampak buruk terhadap kehidupan nasional. Perlu dibanggakan Seminar PPRA XLIII tahun 2009 mengangkat tema energi nasional yang menghasilkan suatu bahasan

berjudul "Penguatan Kebijakan Energi Guna Mendukung Perekonomian Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional", dipaparkan dihadapan Presiden pada tanggal 7 Desember 2009 dan mendapat respon positif. Hal tersebut hendaknya dijadikan bahan yang sangat berharga bagi alumnus PPRA XLIII dalam menjalankan tugas sekembalinya ke lembaga, instansi atau organisasi masing-masing, juga mampu menciptakan wacana baru tatanan kehidupan nasional yang mendorong terciptanya kebijakan yang lebih berpihak pada efektifitas dan efisiensi pengelolaan energi disamping pangan (*food*) dan air (*water*) yang menjadi sumber berbagai bentuk konflik pada tataran global, regional maupun di dalam negeri juga diharapkan dapat memanfaatkan kontribusi teknologi dan budaya hemat dari gaya hidup masyarakat terhadap penggunaan energi sesuai harapan Lemhannas RI. Serta dapat memberi ketauladanan dalam setiap gerak dan langkah sebagai pemimpin yang selalu peka dan peduli terhadap kelangsungan kehidupan sosial politik nasional, dan kepentingan nasional.

Koordinasi Penyusunan LAKIP Tahun 2009

Inspektur Lemhannas RI Irjen Pol. Drs. Alpiner Sinaga selaku pimpinan rapat memimpin rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP Tahun 2009 pada tanggal 13 Januari 2010 pukul 13.00. di ruang kerja Inspektur Lemhannas RI yang dihadiri oleh Personel Pelaksana dibidang Program masing-masing unit kerja Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut Inspektur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Lemhannas RI sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan secara periodik. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP ini dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali.

Adapun prinsip-prinsip pembuatan LAKIP yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan.

Disamping itu, perlu diperhatikan:

1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.
2. Prinsip prioritas. Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan yang pertanggung-

jawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.

3. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu dapat dipercaya/diandalkan, dan mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten), (tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

LAKIP disampaikan melalui mekanisme pelaporan yang melibatkan pihak yang berwenang membuat dan menerima LAKIP, serta pengguna LAKIP Lemhannas RI sebagai Lembaga pemerintah Non Departemen harus dan berwenang membuat LAKIP.

Adapun mekanisme LAKIP adalah sebagai berikut:

- a. Setiap unit kerja wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.
- b. LAKIP tahunan disampaikan kepada Presiden dan wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



Suasana Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP Tahun 2009 di Ruang Inspektorat yang dihadiri oleh Personel pelaksana dibidang program masing-masing unit kerja Lemhannas RI

SERTIJAB

Pelantikan dan penyempahan eselon I,II,III,IV serta pelepasan para pejabat Lemhannas RI yang pindah dan pensiun telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2010 bertempat di Ruang Nusantara Lemhannas RI, oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. Melalui sambutannya, Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa guna memenuhi kebutuhan pembinaan organisasi, terutama dalam menyongsong tantangan tugas mendatang, pada kesempatan ini dilakukan pelantikan pejabat sejumlah 21 orang dan pelepasan sejumlah 8 orang.

Pistiwa alih tugas dan jabatan, sesungguhnya merupakan upaya pembinaan organisasi, agar senantiasa memiliki kinerja yang lebih baik, lebih dipacu untuk menciptakan prestasi yang lebih gemilang, lebih dimotivasi untuk melahirkan karya-karya terbaiknya, dan lebih digiatkan interaksinya, agar dapat dirasakan manfaat keberadaan lembaga ini oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karenanya, pelaksanaan alih tugas dan jabatan ini, merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja organisasi dan sekaligus untuk mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan sejalan dengan pola pembinaan organisasi dan pembinaan personel yang berlaku di lingkungan Lemhannas RI.

Kepada pejabat yang akan alih tugas Gubernur Lemhannas RI menyampaikan, segala pengetahuan dan pengalaman selama ini, hendaknya bisa menjadi bekal yang sangat berharga dan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pada jabatan baru yang dipercayakan oleh pimpinan, baik yang masih ada di lingkungan Lemhannas RI maupun yang alih tugas diluar Lemhannas RI.



Gubernur Lemhannas RI menanggalkan tanda jabatan Direktur Program Pendidikan Debid. Dik Pim Tk. Nas, Brigjen TNI Tony SB Hoesodo, S.Ip, MSc.



Upacara Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon I, II, III dan IV yang dilaksanakan di Ruang nusantara

Kepada para pejabat yang dilepas sehubungan dengan masa purnabakti tanpa cacat, saya ucapkan terima kasih atas segala pengabdian yang telah diberikan selama di Lemhannas ini.

Kami sangat berharap, saudara-saudara yang telah purna tugas akan tetap memberikan dharma baktinya yang terbaik kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, karena pengabdian kepada bangsa dan negara tidak akan pernah mengenal pensiun.

Berita Duka Cita



Gubernur Lemhannas RI beserta keluarga besar Lemhannas RI, mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Brigjen TNI (Purn) Alboin Basir Nababan, S.IP, M.Sc, Tenaga Profesional Lemhannas RI, yang telah meninggal dunia di RSGS-Jakarta pada hari Minggu, 10 Januari 2010 pukul 09.45 WIB. Semoga Amal ibadahnya di terima Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman serta ketabahan lahir bathin. AMIN.....

Pengarah : DR. Ardi Partadinata, MH, M.Si. **Penanggung Jawab :** Brigjen TNI Kusworo,

Redaktur : Kolonel Ckm (K) Dr. Zawiah Ramlie, MH, M.Sc **Penyunting/Editor :** Kolonel Caj. M. Sochib SM.,
Letkol Adm. Drs. M. Syahril, MM, Mayor Inf. Risnal SH. MA.

Redaktur Pelaksana : Linda Purnamasari. , Mayor Caj (K) Rita Ratnayu

Desain Grafis & Fotografer : Arief Musadayan, Arianto, Bambang Iman Aryanto, Hendrik Garang,

Sekretariat : Syafrizal, Gatot

Alamat Redaksi : Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926